KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah_DPR Kebut RUU Ibukota Negara
Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Pemerintah-DPR Kebut RUU Ibu Kota Negara

JAKARTA – Pemerintah dan DPR terus melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) secara maraton. Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN menargetkan pembahasan tuntas di awal tahun depan.

Pemerintah pun ingin ancangan ini rampung secepatnya dan menargetkan Presiden Joko Widodo/Jokowi bisa berkantor di ibu kota baru pada semester pertama 2024. Dalam rapat Pansus RUU IKN dengan pemerintah di Gedung DPR pada Senin (13/12) malam, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soepriadi Praviraatmadja mengatakan bahwa *master plan* pemindahan IKN ini sudah dibentuk. Di dalamnya direncanakan tahapan-tahapan pemindahan ibu kota dari awal sampai akhir.

"Di semester I (2024) dimungkinkan untuk Presiden pindah pada waktu yang telah ditargetkan, "ucap Rudy.

Target Presiden Jokowi berkantor di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tersebut tercantum pada Pasal 3 ayat (2) RUU IKN. *Beleid* tersebut berbunyi, "Pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I (satu) 2024 dan ditetapkan dengan peraturan presiden."

Untuk merealisasikan target tersebut, pembangunan infrastruktur seperti istana kepresidenan dan bandara menjadi prioritas. Artinya, sebelum masa jabatan habis pada akhir 2024, Presiden Jokowi sudah menijalankan tugas kepresidenan di Ibu kota baru. Target ini merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian pemindahan ibu kota, termasuk apa yang akan dibangun di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). "Jadi kalau kita memang mau pindah pada semester I/2024 dan Presiden akan melakukan upacara di sana, yang pasti harus dibangun dulu adalah istana, "ujar Rudy.

Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pun menjadi target selanjutnya. Namun, ASN yang pindah ke ibu kota baru akan dilakukan sesuai kebutuhan awal yang diperlukan. Dengan kata-kata lain, pemindahan ASN, termasuk TNI-Polri, akan secara bertahap dilakukan sampai semua infrastruktur yang ujung-ujungnya bisa berfungsi secara bertahap.

Anggota Pansus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin mengkritik target yang diterapkan pemerintah. Untuk sampai pada keinginan itu, perlu penjelasan dan langkah detail yang disiapkan. Dalam pandangannya, kesiapan infrastruktur membutuhkan pembiayaan sangat besar yang harus dihitung secara matang. "Ini perlu dikasih penjelasan dan pembiayaan, kesiapan infrastruktur, dan seterusnya. Karena enggak bisa sekonyong-konyong pindah," gugatnya.

Kritik yang sama disampaikan anggota Pansus RUU IKN Fraksi Partai Demokrat, Sartono. Anggaran pemindahan ibu kota negara tidak sedikit. Di sisi lain, negara juga perlu memperhatikan kebutuhan lain, khususnya pemulihan ekonomi pascapandemi yang menggerus hampir semua sendi perekonomian nasional. Karena itu, pemindahan ibu kota mestinya dilakukan setelah pandemi dan dampaknya sudah teratasi. "Serta pembayaran utang yang membaik dan konsolidasi fiskal telah berjalan dengan baik," ujarnya.

Sartono mengatakan, pemindahan ibu kota tidak perlu terlalu dipaksakan jika memang tidak memungkinkan pada 2024. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek, khususnya terkait keuangan negara dihantam pandemi dalam dua tahun terakhir. Dia meminta fokus pemerintah dalam dua hingga tiga tahun kedepan adalah pemulihan ekonomi. "Apa urgensi pemindahan IKN pada semester I/2024?" Sartono bertanya.

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembahasan RUU IKN bisa selesai di awal masa persidangan DPR 2022. Keyakinan itu disampaikan Doli setelah resmi menjadi ketua pansus pada pekan lalu. Kendati baru saja dibentuk, dia menargetkan pembahasan RUU IKN selesai dalam waktu cepat. Dengan begitu, pansus mempunyai target tentang pembahasan RUU IKN ini bisa selesai pada awal 2022. "(RUU IKN selesai) awal tahun. Jadi kan kita ini masa sidang berjalan sampai 16 Desember 2021, kemudian reses, 11 Januari 2022 masuk. Nah, sampai Februari-an, di antara itu, "ramalnya.

Selain itu, kata Doli, dari segi teknis pun tak banyak yang dibahas. RUU IKN nantinya hanya akan berisi 34 pasal dan 8 bab.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegatakan, RUU IKN mengatur pemindahan status ibu kota negara atau bukan pemindahan secara fisik. Dia memastikan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Rencanain-duk atau *master plan* juga sudah dibuat untuk dijadikan paduan dalam proses pelaksanaannya. "Pemindahan IKN secara fisik ada fasenya, di sini kami sebutkan 2022 sampai 2024, 2025 sampai 2035, 2035 sampai 2045," paparnya.

SUWARNO

TANCAP GAS IBU KOTA BARU

Proyek prestisius pembentukan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur kembali tancap gas. Setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir, kini pemerintah mulai menyelesaikan berbagai tahapan persiapan. Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN baru kini dikebut di lembaga legislatif. Semester pertama tahun 2022 diharapkan beleid tersebut tuntas.

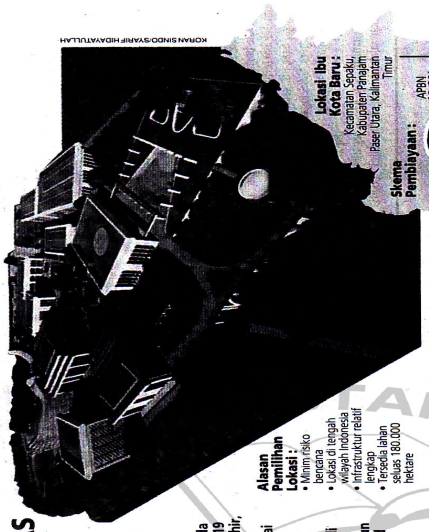

KORAN SINDO/SYARIF HIDAYATULLAH

Alasan Pemilihan Lokasi :
- Minim risiko bencana
- Lokasi di tengah wilayah Indonesia
- Infrastruktur relatif lengkap
- Tersedia lahan seluas 180.000 hektare

Lokasi Ibu Kota Baru : Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Skema Pembiayaan :

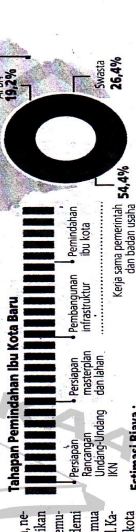

Tahapan Pemindahan Ibu Kota Baru

Estimasi Biaya :
- Skenario I : Jika seluruh ASN dari IKN lama dipindah, total biaya yang dibutuhkan ▸ Rp466 triliun.
- Skenario II : Jika sebagian ASN dari IKN lama dipindah, total biaya yang dibutuhkan ▸ Rp323 triliun.

KORANSINDO